

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGANKDENGAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI  
(Studi Kasus Pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kab.  
Karanganyar)**

**Amanda Thea Hosana <sup>1)</sup>**

**Rispantyo <sup>2)</sup>**

**Bambang Widarno <sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta.

*e-mail:* <sup>1)</sup>[Amandatheya1@gmail.com](mailto:Amandatheya1@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study was conducted to determine the effect of good governance on the quality of local government financial reports, the effect of internal control systems on>the quality of local government financial reports, the internal control system moderates the effect of good governance on the quality of local government financial reports. This study uses primary data from the answers to the questionnaires distributed to officials of the Karanganyar Regency Regional Government Organization. The sampling technique was taken using purposive sampling method, amounting to 72 respondents. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical test, validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, t test, F test, determination test (R<sup>2</sup>) and MRA absolute difference test. The result of the research states that good governance and internal control systems have a significant positive effect. The result of moderation regression analysis with absolute difference value test shows that the internal control system isn't able to negatively moderate the relationship of good governance to the quality of local government financial reports.*

***Keywords: good governance, internal control system, quality of local government financial reports***

**PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi pemerintah daerah dituntut oleh masyarakat untuk mengatur tata kelola yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik adalah keberhasilan dalam menjalankan tugas guna membangun sebuah negara selaras dengan tujuan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan tersebut setiap pemerintah wajib mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terutama ialah keuangan (Permana, 2011).

Sesuai.dengan Pasal 23C 1945 mengenai Keuangan Negara telah ditetapkan tatanan pokok dalam UUD yang menjabarkan tentang asas pengelolaan keuangan, dan menerapkan kaidah akuntabilitas yang nantinya akan dipertanggung jawabkan melalui laporan keuangan. Pemerintah daerah telah mendapat pelimpahan dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah dan dari pemerintah pusat, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selaras dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) selaras pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010.

Parameter dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah berkualitas adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Adhi dan Suhardjo, 2013). Selain tata kelola yang baik BPK menjadikan SPI selaku salah satu kriteria bagi pemeriksaan kewajaran suatu laporan keuangan berasaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pendapat bagi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah WTP, namun dalam hal ini BPK menemukan masalah terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Kelemahan yang terkait dengan SPI adalah potensi pemungutan pajak dan tata usaha aset yang belum memadai. Sedangkan kelemahan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain masih terdapat realisasi belanja hibah kepada instansi vertikal dan kekurangan volume pada beberapa pekerjaan. Harapan dari BPK adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertanggungjawab atas LKPD yaitu OPD dalam menindaklanjuti perihal masalah tersebut. (<https://timlo.net/baca/37179/karanganyar-capai-wtp-perdana-di-jateng> 2019)

Penelitian ini mengacu pada Herawati dan Nopianti (2017) mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang kedua menyarankan agar menambahkan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Alasan dalam pemakaian variabel tersebut dikarenakan adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya. Penelitian dari Sholikhah, *et al* (2016) beserta Karsana dan Suaryana (2017) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya hasil penelitian oleh Inapty dan Martiningsih (2016) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka peneliti tertarik dengan menemukan *research gap*.

Tujuan dari pengkajian judul ini adalah: 1) Menganalisis pengaruh *good governance* pada kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. 2) Menganalisis pengaruh Sistem pengendalian Internal (SPI) pada kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. 3) Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) memoderasi *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **TEORI AGENSI**

Teori agensi menyatakan hubungan antara dua pihak yang berperan serta dalam kontrak yang terdiri dari agen selaku pihak yang diberi tanggung jawab atas tugas dan prinsipal sebagai pihak memberi tanggung jawab (Widanaputra dan Mimba, 2014). Dalam Jensen dan Meckling (1976) pula menjabarkan ikatan teori agensi dimana pemilik entitas (prinsipal) memberikan kewenangan pada agen guna membuat keputusan terbaik. Didalam teori agensi dapat terjadi konflik apabila kepentingan dari manajer dan pemilik berbeda (Nyberg *et al*, 2010).

## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Standar akuntansi pemerintah (SAP) ialah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No.71 tahun 2010). Pada PP No.71 Tahun 2010 dan Pemendagri No 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa LKPD harus disusun berdasarkan basis akrual, dan SAP mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang dituangkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP). Menurut Bastian (2005: 134) SAP ialah prasyarat yang mempunyai pada upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

## KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Menurut Wati *et al*, (2014) dan Prasetya (2005) laporan keuangan adalah alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangant manajemen suatu pemerintahan kepada public yang dipercayakan kepadanya. Menurut PP No.71/2010, kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan oleh informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya sebagai kebutuhan sesama pengguna laporan keuangan pemerintah Mahsun *et al*, (2006: 3).

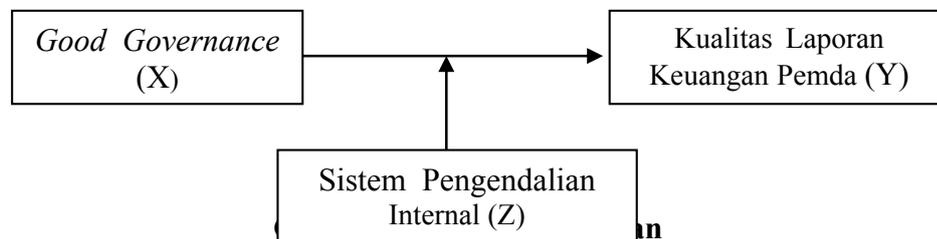
## GOOD GOVERNANCE

Menurut Hasyim (2014) dan Mandalika, *et al* (2018) *good governance* ialah kesepakatan menyangkut pengaturan suatu wilayah yang diciptakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana masyarakat mengutarakan kepentingan mereka. Menurut Ristina dan Indah (2014) manfaat yang diterima dari pelaksanaan *good governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP ialah Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan diseluruh lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Sistem Pengendalian Internal menurut Mulyadi (2013: 163) ialah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan atasan.

## Model dan Hipotesis Penelitian



Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin buktikan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

*Good Governance* ialah pengolahan pemerintahan yang baik.

Pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan segala sumber daya ada guna kemakmuran masyarakat (Deddy Somantri, 2009). Pengelolaan keuangan OPD yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pada masyarakat dan pemerintah secara efektif, dengan menerapkan karakteristik *good governance* sangat potensial untuk menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini selaras dengan penelitian Anggreni, *et al* (2018) dan Oktarina, *et al* (2016) bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini

H<sub>1</sub>: *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## 2. Pengaruh SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian internal ialah prosedur, kebijakan yang diterapkan guna memberikan arahan atau keyakinan yang memadai bahwa sasaran dan tujuan organisasi sudah dicapai. Pada dasarnya sistem pengendalian internal merupakan faktor eksternal yang disusun untuk memudahkan pegawai OPD dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian internal yang kurang akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan yang dilaporkan.

Hal ini selaras dengan penelitian dari Sholikah, *et al* (2016), Karsana dan Suaryana (2017), Sanjaya, *et al* (2017), dan Rahmawati *et al* (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori terdahulu, hipotesis penelitian ini:

H<sub>2</sub>: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## 3. Pengaruh SPI Memoderasi Hubungan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian yang baik tidak berguna jika tidak didukung oleh tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Dengan demikian tata kelola yang baik yang didukung oleh sistem pengendalian yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian dengan menggunakan SPI sebagai pemoderasi *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan belum pernah dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang dijelaskan diatas. Dengan SPI sebagai variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh Sholikah *et al* (2016), Karsana dan Suaryana (2017), Sanjaya, *et al* (2017), dan Rahmawati *et al* (2018) menunjukkan hasil signifikan positif

Berdasarkan teori terdahulu, hipotesis penelitian ini.

H<sub>3</sub>: Sistem Pengendalian Internal memoderasi secara signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan Organisasi Pemerintah Daerah berbentuk badan dan dinas di Kabupaten Karanganyar.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis data**

Jenis data dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012: 3) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan data kuantitatif dengan menggunakan skala *likert*.

#### **Sumber data**

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan data primer dan sekunder, yaitu menggunakan wawancara dan kuisisioner yang disebarakan kepada aparatur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) berbentuk badan dan dinas di Kabupaten Karanganyar.

#### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2009), populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu diambil suatu kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbentuk dinas dan badan di Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 20 OPD, masing masing diambil 3-4 responden. Sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 60 – 80 orang.

#### **Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan karakteristik responden menerapkan beberapa kriteria tertentu pada aparatur Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Karanganyar antara lain perangkat daerah yang bekerja dibagian keuangan sebagai kepala bagian keuangan atau staf dan bekerja paling lama di OPD berbentuk badan dan dinas di Kabupaten Karanganyar.

#### **Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang dipakai meliputi pengujian validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji MRA, uji t, uji F, koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Instrumen**

Variabel *good governance* (X), system pengendalian internal (Z) dan kualitas laporan keuangan (Y) dengan masing-masing variabel mempunyai 8-9 butir pertanyaan menunjukkan seluruh butir pertanyaan valid, ditunjukkan dengan  $p(0,000) < 0,05$ . Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item kuisisioner mengenai *good governance* (X), system pengendalian internal (Z) dan kualitas laporan

keuangan (Y) yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel (handal) karena *Cronbach Alpha* > 0,06.

### Uji Asumsi klasik

Hasil uji multikolinearitas menghasilkan nilai *tolerance* (0,518; 0,518) > 0,10 dan nilai VIF (1,929; 1,929) < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi diperoleh Z hitung sebesar -0,950 dengan signifikan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,342 *p-value* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel independen memiliki nilai *p-value* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,62 *p-value* > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan guna menganalisis pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	5.607	3.767			1.489	.141
1 X	.393	.108	.434		3.631	.001
Z	.372	.137	.325		2.721	.008

Sumber : Data yang diolah, 2020

$$Y = 5.607 + 0,393X_1 + 0,372X_2 + e$$

### Analisis Regresi Moderasi dengan Uji Nilai Selisih Mutlak

Uji nilai selisih mutlak dipakai guna mengetahui apakah variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Tabel 2. Analisis Regresi Moderasi dengan Uji Nilai Selisih Mutlak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	34,986	,301		
Zscore(ZX)	0,927	,262	,415	3,545	,001
Zscore(ZZ)	0,831	,266	,372	3,128	,003
ABSZX_ZZ	-0,804	,391	-,177	-2,054	,044

Sumber: Data yang diolah, 2020

$$Y = 34,986 + 0.927 ZX + 0,831 ZZ + -0,804|ZX - ZZ| + e$$

### Uji Hipotesis

#### Uji t

Uji t dipakai guna membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	T	Sig
(Constant)	1,489	0,141
X	3,631	0,001
Z	2,721	0,008

Sumber: data yang diolah 2020

### Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui ketepatan model pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Sum of .Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression.	173,277	2	88,639	33,079	,000 <sup>b</sup>
Residual.	180,723	69	2,619		
Total.	354,000	71			

Sumber: data yang diolah 2020

Hasil analisis uji F sebesar 33,079 dengan *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model regresi yang dipakai dipenelitian ini layak untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis.

### Uji Determinasi atau R Square ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan *independent variable* mampu untuk menjelaskan *dependen variable*.

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,700 <sup>a</sup>	,489	,475	1,61839

Sumber : Data yang diolah, 2020

Hasil uji determinasi diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* 0,475 dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan mampu dijabarkan oleh variabel independen yaitu *good governance* dan sistem pengendalian internal karena *Adjusted R Square* sebesar 47 sisanya ( $100\% - 47\% = 53\%$ ) dijabarkan oleh sebab-sebab yang lain diluar model seperti sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

### 1) Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada variabel *good governace* dapat diketahui t sebesar 3,631 dengan *p-value*  $0,001 < 0,05$ . Artinya *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis pertama yang berbunyi “*Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, terbukti kebenarannya.

Tata kelola yang baik adalah sistem yang mengatur semua urusan yang

ada didalamnya, terkait dengan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Anggreni, et al (2018) dan Oktarina, et al (2016) bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota Denpasar.

**2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan hasil uji t pada variabel kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui  $t = 2,721$  dengan  $p\text{-value } 0,008 < 0,05$ . Artinya sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis pertama yang berbunyi “Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, terbukti kebenarannya.

Sistem pengendalian internal yang berjalan secara efektif dan efisien, secara optimal akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholikhah et al (2016), Karsana dan Suaryana (2017), Sanjaya, et al (2017), dan Rahmawati et al (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**3) Sistem Pengendalian Internal memoderasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel moderasi sistem pengendalian intern mampu memoderasi secara signifikan negatif hubungan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena interaksi dari ABSZX\_ZZ mempunyai  $p\text{-value}$  sebesar  $0,044 > 0,05$  dan hasil T sebesar  $-2,054$ . Sehingga hipotesis ketiga yang berbunyi “Sistem pengendalian internal memoderasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”, tidak terbukti kebenarannya.

Secara logika sistem pengendalian internal mampu memoderasi secara signifikan negatif hubungan antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tentang sistem pengendalian internal memoderasi secara signifikan negatif hubungan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan didukung oleh sebagai berikut:

- a. Penelitian terdahulu dari Achmad (2018) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi hubungan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Fenomena yang terjadi di OPD Kab. Karanganyar. Menurut wawancara peneliti dengan aparatur OPD kab. Karanganyar bapak denny, menyatakan bahwa evaluasi kerja tersebut terkadang dilakukan langsung oleh pimpinan organisasi perangkat daerah itu sendiri namun OPD Kab. Karanganyar tidak menunjuk secara formal aparatur OPD sebagai personil pengendalian internal guna melaksanakan evaluasi kerja.
- c. Sistem pengendalian internal bukan sebagai variabel moderasi, tetapi sebagai variabel independen. Hal ini didukung oleh Sholikhah et al

(2016), Karsana dan Suaryana (2017), Sanjaya, *et al* (2017), dan Rahmawati *et al* (2018) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### **KESIMPULAN**

1. *Good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil analisis regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak menunjukkan sistem pengendalian intern mampu memoderasi secara signifikan negatif hubungan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Keterbatasan**

1. Distribusi penyebaran kuesioner hanya dilakukan di 20 OPD di Kabupaten Karanganyar berbentuk badan dan dinas saja dan ada 2 OPD yang menolak untuk dilakukan penelitian. Sehingga hasil pengumpulan data hanya diperoleh 72 orang responden.
2. Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini masih terdapat beberapa variabel bebas yang belum dicantumkan dan kemungkinan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Saran**

1. Saran untuk OPD Kabupaten Karanganyar.
  - a. Untuk Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar lebih memaksimalkan *good governance* atau tata kelola yang baik yang, dan melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif efisien dan optimal sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.
  - b. Melaksanakan evaluasi kinerja dengan aparatur yang ditunjuk sebagai internal di setiap OPD untuk melaksanakan sistem pengendalian internal.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya
  - a. Metode yang digunakan tidak hanya menyebar kuesioner dan wawancara saja tetapi sebaiknya dilengkapi dengan adanya data sekunder yang diambil dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
  - b. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah ruang lingkup penelitian tidak hanya pada OPD berbentuk badan dan dinas saja.
  - c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel intervening sebagai pembanding dalam penelitian yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
  - d. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan indikator sistem pengendalian internal lain yang perlu diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo. 2013. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan studi kasus pada pemerintahan kota Tua". *SKRIPSI STIE SEMARANG* Vol.5 No.3.
- Anonym. Pemerintah Indonesia. 2008. *Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008* Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jakarta: Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010* Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta : Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010* Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Deddy Somantri Yusuf. 2009. "Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. Kabupaten Bireuen" *Jurnal Ilmiah ekonomi, manajemen, akuntansi*.
- Hasyim, A. Dardiri. 2014. *Good Governance dan Piagam Madinah. Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA*.
- Herawati, Tuti, Defi Nopianti. 2017. "Pengaruh Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Skripsi Bandung: STEMBI Bandung*.
- Inapty, M. Ali Fikri Biana Adha., Martiningsih, RR. Sri Pancawati. 2016. "Pengaruh Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan." *Jakarta: Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency, and Ownership Structure." *North Holland: Journal. of Financial Economics*,3 (4), hal. 305-360.
- Karsana, I wayan, dan Suaryana, I Gusti Ngurah Agung. 2017. "Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli." *Skripsi Bali: E-Journal Akuntansi*.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mandalika, Rudolfo., et al. 2018. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kelurahan Kolongan Mitung Tahuna Barat Kabupaten Sangihe" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1(1).
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat. Jakarta.
- Nyberg, Anthony J., et al.+2010. "Agency Theory Revisited: CEO Return and Shareholder Interest Alignment." *USA: Academy of Management.Journal*,

53(5), hal. 1029–1049.

- Oktarina, Mia., Kharis Raharjo dan Rita Andini. 2016. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)” *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*.
- Permana, Irvan. 2011. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung.” *Skripsi Bandung: Universitas Komputer Indonesia*.
- Prasetya, GE. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta (ID): Andi Publisher
- Rahmawati, Astika., I Wayan\_Mustika dan Lilik Handayan Eka..2018. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018, pp. 8-17*.
- Ristina Sitio dan Indah Anisykurillah, 2014. ”Pengaruh Pemahaman *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor KAP di Wilayah Kota Semarang.” *Jurnal Accounting Analysis*, 3 (3), hal. 301 – 309.
- Sanjaya, Aditya., M. Rasuli dan Eka Haryani. 2017. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Akuntansi Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar)” *JOM Fekon Vol.4 No.1 (Februari) 2017*.
- Sholikah, Risdhayanti Nur. Dewi Saptantinah Puji Astuti dan Muhammad Rofiq Sunarko. 2016. “Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor DPPKAD Kab. Boyolali).” Boyolali: diterbitkan *E-Journal Unisri Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* . Vol. 12, April 2016: 168 – 175.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, K. Desianan., N. Trisna Herawati & Ni. K. Sinarwati. 2014. “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem kuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Bali.” *E-journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurnal Akuntansi program S*. Volume 2, No:1. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Widanaputra, A.A. dan N.P.S.H. Mimba. 2014. “The Influence of Participative Budgeting on Budgetary Slack in Composing Local Governments’ Budget in Bali Province.” *Bali: Procedia – Social and Behavioral Sciences* 164, hal. 391-396.